**PENGARUH KOMPETENSI, KEPEMIMPINAN YANG BERWAWASAN WIRAUSAHA DAN KOMITMEN KEPALA DESA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA**

**(SURVEY DI SELURUH DESA DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING)**

Oleh :

**Haris Fauzi 1,Atty Tri Juniarti2, Iman Sudirman3**

**NPM. 199010034**

e-mail : harisfauzi312@gmail.com, attytj03@gmail.com, imansudirman@unpas.ac.id.

1 Universitas Majalengka

2,3 Universitas Pasundan Bandung

**ABSTRAK**

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha dan Komitmen kepala desa Terhadap Tata kelola pemerintahan desa serta dampaknya terhadap kinerja kepala desa pada Desa di wilayah Ciayumajakuning.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa di wilayah Ciayumajakuning, dengan sampel sebanyak 312 responden. Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah *Cluster Proportionate Stratified Random Sampling*. Skala pengukuran penelitian ini menggunkan skala *likert*. Pengujian instrumen data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas, sedangkan analisis datanya adalah dengan menggunakan alat analisis SEM.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kompetensi, kepemimpinan yang berwawasan wirausaha, Komitmen dalam kriteria baik, dan tata kelola pemerintahan desa dan kinerja kepala desadalam kriteria baik. Hasil penelitian secara parsial kompetensi, kepemimpinan yang berwawasan wirausaha dan komitmen berpengaruh signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa, kemudian tata kelola pemerintahan desa berpengaruh signifikan terhadap Kinerja kepala Desa. Hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa kompetensi, kepemimpinan yang berwawasan wirausaha dan komitmen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa.

# Kata Kunci : kompetensi kepala desa, kepemimpinan yang berwawasan wirausaha, komitmen kepala desa, tata kelola pemerintahan desa, kinerja kepala desa

\* ) Dosen Tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis

**Pendahuluan**

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, menjadikan Desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Selain itu Desa juga mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengatur sistem pemerintahan sendiri. Selanjutnya, Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014(UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi: Peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Pemerintah Pusat memberikan aliran dana tambahan kepada Desa diluar Alokasi Dana Desa yang sudah diterima Desa setiap tahunnya, yaitu Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang [diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). PerkembanganDana Desa yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dengan jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.093 desa dapat dilihat pada Gambar](http://repository.unej.ac.id/) [berikut:](http://repository.unej.ac.id/)



Dengan adanya pengalokasian dana Desa sesuai dengan Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 Pasal 78 bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian Desa melalui pengembangan BUMDES diharapkan bisa cepat menggerakan perekonomian untuk kepentingan masyarakat dengan demikian kemiskinan bisa turun secara signifikan, berikut adalah Tabel kemiskinan di Indonesia menurut Berita resmi statistik No.16/02/th. XXIV, 15 Pebruari 2021:

**Profil Kemiskinan di Indonesia**

**(dalam juta jiwa)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **Tahun 2015** | **Tahun 2016** | **Tahun 2017** | **Tahun 2018** | **Tahun 2019** | **Tahun 2020** |
| **Maret** | 28.59 | 28.01 | 27.77 | 25.95 | 25.14 | 26.42 |
| **September** | 28.51 | 27.77 | 26.58 | 25.67 | 24.79 | 27.55 |

 Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2015 angka kemiskinan mencapai 28.51 juta jiwa dan di tahun 2016 memang ada penurunan angka kemiskinan yang tadinya 28.51 juta jiwa menjadi 27.77 juta, sedangkan di September 2020 mengalami kenaikan dari maret 2020 yaitu dari 26.42 juta jiwa naik menjadi 27.55 juta jiwa. Artinya kalau dilihat dari tabel di atas kemiskinan di Indonesia naik turun dan kalaupun ada penurunan, penurunannya tidak signifikan padahal anggaran yang dialokasikan ke Desa setiap tahunnya terus bertambah.

 Selama ini pembangunan di Desa khususnya di Jawa Barat belum berjalan sesuai harapan atau bisa sebut belum maksimal, hal ini dapat dilihat data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa barat tentang status desa berdasarkan status Indek Desa Membangun sebagai berikut:

**Data Status Desa di Jawa Barat Sesuai Kategori IDM**

**(Indeks Desa Membangun)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Status Desa** | **Jumlah Desa** |
| 1. | Sangat Tertinggal | 0 |
| 2. | Tertinggal | 121 |
| 3. | Berkembang | 3.920 |
| 4. | Maju | 1.631 |
| 5. | Mandiri | 270 |

 Sumber: DPMD 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total 5.312 Desa yang ada di Jawa Barat, Desa yang masuk kategori Desa mandiri sebanyak 270 Desa, Desa yang masuk kategori Desa maju sebanyak 1.631 Desa, sedangkan Desa yang masuk kategori Desa berkembang adalah sebanyak 3.920 Desa, dan yang lebih memprihatinkan lagi ternyata di Jawa Barat masih ada Desa yang masuk kategori Desa tertinggal yaitu sebanyak 121 Desa yang tersebar di 18 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Penulis akan menampilkan juga data yang ada di kabupaten Cirebon, Indramayu Majalengka dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning), karena empat kabupaten ini adalah kabupaten yang akan di jadikan sebagai objek penelitian, alasan dijadikan objek penelitian karena empat Kabupaten ini tertinggi kemiskinanya di Jawa Barat, maka untuk lebih jelasnya penulis akan menampilkan data kemiskinan di Ciayumajakuning dalam tabel berikut ini:

**Persentase Penduduk Miskin (Persen), 2018-2020, Ciayumajakuning**

**(dalam persentase)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kabupaten** | **Jumlah Desa** | **Persentase Penduduk Miskin** |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | Kuningan | 361 | 12,22 | 11,41 | 12,82 |
| 2. | Indramayu | 317 | 11,89 | 11,11 | 12,70 |
| 3. | Majalengka | 330 | 10,79 | 10,06 | 11,43 |
| 4. | Cirebon | 412 | 10,70 | 9,94 | 11,24 |

 Sumber: BPS Jawa Barat 2020

Dilihat dari Tabel diatas terlihat jelas bahwa kemiskinan mengalami kenaikan, dilihat dari tabel diatas bahwa kab Kuningan peringkat 1 kemiskinannya di wilayah Ciayumajakuning, peringkat ke-2 adalah kab Indramayu dan kab Majalengka berada di peringkat ke-3, sedangkan Kab Cirebon berada pada peringkat ke 4.

Kepala Desa merupakan salah satu faktor penting dalam pemerintahan Desa, ini yang menjadi alasan menjadikan Kepala Desa sebagai objek penelitian dikarnakan maju mundurnya sebuah Desa tergantung kepada Kepala Desanya. Kepala Desa harus dapat mengelola perangkat aparatur Desa secara produktif dan ia harus mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga aparatur Desa dapat melaksanakan tugasnya tanpa tekanan dari pimpinan tapi atas dasar kesadaran akan tuntutan kerja

Kinerja adalah “suatu upaya mendapatkan kondisi yang unggul dengan melakukan pembaharuan sebagai wahana untuk membawa inovasi ke dalam organisasi” PP Nomor 30 Tahun 2019. Pengertian kinerja instansi pemerintah menurut LAN RI (2003) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan. Menurut  Mangkunegara (2017) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Baik dan tidaknya Tata kelola Pemerintahan Desa juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja, Meskipun belum ada yang mendefiniskannya secara formal, namun Tata kelola Pemerintahan dianggap penting untuk menjamin kesejahteraan nasional.

UNDP dalam Mardiasmo (2018). Menurut (Aminudin, 2019). Bahwa Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik adalah Mewujudkan konsep *Good Governance* memerlukan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menandakan transformasi dari jenis hubungan dimana menjalankan pemerintahan dalam rangka untuk memenuhi yang diperlukan oleh warga masyarakat.

UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas efisiensi, partisipatif. Kesadaran pemerintah tentang adanya akuntabilitas dan prinsip – prinsip Good Governance, pemerintah mulai mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik menuju Good Governance (Acintya dan Putri, 2015). Adanya akuntabilitas diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dan dapatdipercaya oleh masyarakat (Onuorah dan Appah, 2016).

Dalam mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Desa. Faktor kompetensi menjadi sangat berguna untuk membantu Pemerintahan dalam meningkatkan kinerjanya. Menurut Busro (2018) “Kompetensi merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan keterampilan dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.” Pendapat tersebut dikuatkan oleh pernyataan Mathis dan Jackson (2016) menjelaskan bahwa, “*Competency is a base characteristic that correlation of individual or team performance achievement.*” (kompetensi merupakan karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu pegawai maupun tim). Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi menyangkut kemampuan dasar seseorang untuk melakukan pekerjaan,

Ada beberapa faktor lain yang dianggap berpengaruh pada tata kelola pemerintahan desa diantaranya adalah Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha. Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan yang digunakan sebagai modal untuk melakukan perubahan kearah keberhasilan. Pemimpin harus mengarahkan segenap sumber daya manusianya untuk merealisasikan visi dan misi organisasi. Salah satu faktor penting yang berpengaruh dalam keberhasilan seorang pemimpin adalah kepemimpinan yang berwawasan wirausaha, Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha adalah kekuatan utama yang dibutuhkan untuk berhasil melakukan perubahan.

Komitmen organisasi yang tinggi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, karena dengan terciptanya komitmen yang tinggi akan mempengaruhi iklim kerja yang professional dan kenyamanan dalam bekerja, Komitmen sendiri bisa dilakukan dengan cara suka rela atau tanpa unsur paksaan, banyak orang menjalani komitmen pada sesuatu karena mencintai apa yang mereka lakukan. Menurut Luthans dalam Sutrisno (2017),

Komitmen organisasi merupakan: (1) keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dalam suatu kelompok, (2) kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi, (3) suatu keyakinan tertentu dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi”.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

* 1. Bagaimana Kompetensi Kepala Desa, Kepemimpinan yang berwawasan Wirausaha dan Komitmen Kepala Desa.
	2. Bagaimana Tata kelola pemerintahan Desa.
	3. Bagaimana Kinerja Kepala Desa.
	4. Seberapa besar pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha dan komitmen terhadap Tata kelola pemerintahan Desa.
	5. Seberapa besar pengaruh Kompetensi terhadap Tata kelola pemerintahan Desa.
	6. Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha terhadap Tata kelola pemerintahan Desa*.*
	7. Seberapa besar pengaruh Komitmen Kepala Desa terhadap Tata kelola pemerintahan Desa.
	8. Seberapa besar pengaruh Tata kelola pemerintahan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa.

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Kompetensi, Kepemimpinan yang berwawasan dan Komitmen Kepala Desa.
2. Tata kelola pemerintahan Desa pada Desa di Wilayah Ciayumajakuning.
3. Bagaimana Kinerja Kepala Desa.
4. Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha, komitmen terhadap Tata kelola pemerintahan Desa.
5. Pengaruh Kompetensi terhadap Tata kelola pemerintahan Desa.
6. Pengaruh Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha terhadap Tata kelola pemerintahan Desa.
7. Pengaruh Komitmen terhadap Tata kelola pemerintahan Desa.
8. Pengaruh Tata kelola pemerintahan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa.

**Metode Penelitian**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengujian instrument penelitian dilakukan dengan menggunakan uji validitas, uji realibilitas dan uji normalitas data, sedangkan analisis data menggunakan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk uji parsial, dan uji f untuk uji simultan.

**Kerangka Pemikiran**

Menurut Dale dalam Sudarmanto (2011) kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Kompetensi merupakan landasan karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku dan berpikir, menyamakan situasi dan mendukung untuk periode waktu yang cukup lama. Sehingga kompetensi merupakan gabungankarakteristik dari tenaga ahli yang memiliki kontribusi meningkatkan kinerjadalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Aminudin, (2019) Untuk mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Desa memerlukan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menandakan transformasi dari jenis hubungan dimana menjalankan pemerintahan dalam rangka untuk memenuhi yang diperlukan oleh warga masyarakat, ini semua membutuhkan seorang kepala desa yang mempunyai kompetensi yang baik.

Menurut Stimson, Robert jd.at.al (2011), kepemimpinan adalah kapasitas untuk menciptakan mekanisme dan aliansi yang kuat dan stabil untuk mengembangkan segala hal baik dalam wilayah baik skala mikro ataupun makro. Elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut Stimson, Robert jd.at.al. (2011) adalah adanya kolaborasi, kepercayan, pembagian kekuasaan, fleksibilitas, dan jiwa kewirausahaan. Jadi, kepemimpinan dalam pengembangan wilayah pedesaan bukanlah merupakan hubungan hierarkial, melainkan lebih sebagai hubungan kolaborasi antara aktor kelembagaan yang meliputi sector pemerintah, swasta,dan masyarakat. Kolaborasi tersebut didasari oleh rasa saling percaya dan kemauan bekerja sama. Seorang pemimpin juga harus memiliki jiwa entrepreuneurship, yang berarti selalu ingin adanya perubahan, mampu berinovasi dan berfikir kreatif, sehingga mampu mengembangkan kemampuan kompetitif wilayahnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Ketika menjalakan pekerjaan disebuah organisasi swasta atau pemerintahan tentunya memerlukan sebuah komitmen dimana dengan adanya sebuah komitmen yang bagus dapat meningkatkan kualitas kinerja dan semangat kerja bagus. (Lincoln, 1989 dan Bashaw, 1994) dalam Sopiah, 2013) mengemukakan bahwa, “komitmen organisasional memiliki tiga indikator: kemauan karyawan, kesetiaan karyawan, dan kebanggaan karyawan pada organisasi. Sedangkan menurut Allen & Mayer (2013) yaitu kepercayaan dan penerimaan orang atas nilai dan tujuan organisasi, sehingga membuat orang itu untuk betah dan tetap ingin bertahan di organisasi.

Prinsip *Good governance* merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia (Nugraheni dan Subaweh, 2008). Abdul-Qadir dan Kwanbo (2012) mengatakan bahwa tata kelola perusahaan berkaitan dengan hubungan antara berbagai pemangku kepentingan sah perusahaan. Tujuan utama dari implementasi prinsip-prinsip *good governance* yaitu kinerja organisasi semakin meningkat serta hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi (Nubatonis dkk., 2014).

Apriliana, (2014) mengemukakan bahwa Tata kelola Pemerintahan Desa bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih dekat dengan masyarakat dengan berpartisipatif menyuarakan pendapat dan mengurangi penyelewengan anggaran dan memastikan bahwa keputusan dan proses pelaksanaannya terbuka dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Menurut Koiman dalam Sedarmayanti 2014) *Governance* merupakan proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat pada berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Dari kerangka pemikiran diatas, maka penulis dapat membuat paradigm penelitian sebagai berikut:

**Kompetensi Kepala Desa**

1. *Achievement and action* (Prestasi dan tindakan)
2. *Helping human service* (membantu dan melayani orang lain)
3. *Impact and influence* (Dampak dan pengaruh)
4. *Managerial* (Manajerial)
5. *Cognitif* (Kognitif)
6. *Personal effectiveness* (Efektivitas Pribadi)

Spencer dan Spencer dalam Sudarmanto, (2011)

**Good Village Governance**

* + - * 1. Partisipasi masyarakat
				2. Tegaknya Supremasi Hukum
				3. Transparansi
				4. 4. Peduli pada Stakeholder
				5. Berorientasi pada Konsensus
				6. Kesetaraan
				7. Efektivitas dan Efisien
				8. Akuntabilitas
				9. Visi Strategis.

UNDP dalam Mardiasmo (2018)

* + - * 1. Partisipasi masyarakat
				2. Tegaknya Supremasi Hukum
				3. Transparansi
				4. Peduli pada Stakeholder
				5. Berorientasi pada Konsensus
				6. Kesetaraan
				7. Efektivitas dan Efisien
				8. Akuntabilitas

Visi Strategis.

**Kinerja Kepala Desa**

1. Objektif
2. Terukur
3. Akuntabel
4. Partisipatif
5. Transparan

PP Nomor 30 Tahun 2019

**Kepemimpinan berwawasan wirausaha**

1**.** Orientasi strategi yang didorong persepsi peluang

2. Tanggap terhadap peluang-peluang

3. Tanggap terhadap sumber-sumber daya

4. Pengendalian sumber-sumber daya

5. Visi yang realistik

J.Winardi (2016)

**Komitmen Kepala Desa**

1. Memiliki makna yang mendalam secara pribadi
2. Rasa saling memiliki yang kuat dalam organisasi
3. Bangga memberitahukan hal tentang organisasi dengan orang lain
4. Terikat secara emosional dengan organisasi
5. Senang apabila dapat bekerja di organisasi sampai selsai
6. Senang berdiskusi mengenai organisasi dengan orang lain di luar organisasi

mayer dan allen dalam Nurandini (2014)

**Gambar**

**Paradigma Penelitian**

**Populasi**

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2014). Populasi dalam penelitian ini adalah semua Desa yang ada wilayah Ciayumajakuning sebanyak 1.420 Desa, sedangkan unit populasinya adalah semua Kepala Desa yang ada wilayah Ciayumajakuning yang berjumlah 1.420 Kepala Desa.

**Sampel**

Adapun sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling*, teknik ini digunakan karena populasinya tidak homogen, mengacu pada pendapat Sugiyono (2011: 82) bahwa, “*Proportionate Stratified Random Sampling* digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional”. Strata yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu Desa yang masuk kategori Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri.

Jumlah anggota sampel total ditentukan melalui Rumus Taro Yaname dan Slovin, hal ini mengacu pada pendapat Riduwan dan Engkos (2011: 49) bahwa “teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Taro Yaname dan Slovin apabila populasi sudah diketahui”. Adapun rumus tersebut adalah sebagai berikut:

$$n=\frac{N}{N.d^{2 }+1}$$

Dimana:

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah Populasi

d2 =Presisi

Presisi yang di tetapkan 5%, maka: $ n=\frac{N}{N.d^{2 }+1}=\frac{1.420}{1.420.\left(0,05\right) ^{2}+1}=\frac{1.420}{4.55}=312 Kepala Desa$

Jumlah anggota sampel bertingkat (berstrata) dilakukan dengan cara pengambilan sampel secara *proportional Cluster Stratified random sampling* yaitu menggunakan rumus alokasi *proportional:*

yaitu menggunakan rumus alokasi *proportional:*

$$ni=\frac{Ni}{N}.n$$

Dimana :

ni = Jumlah anggota sampel menurut stratum

n = Jumlah anggota sampel seluruhnya

Ni = Jumlah anggota populasi menurut stratum

N = Jumlah anggota populasi seluruhnya

**Hasil dan Pembahasan**

**Hasil Penelitian**

**Uji Validitas dan Reliabilitas**

Agar hasil penelitian ini representatif, maka perlu dilakukan analisis validitas. Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan suatu instrumen dalam penelitian.

**Pengujian Reliabilitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **r hitung** | **Cut Value** | **Keterangan** |
| Kompetensi Kepala Desa | 0,964 | 0,7 | Reliabel |
| Kepemimpinan yang berwawasan Wirausaha | 0,963 | 0,7 | Reliabel |
| Komitmen Kepala Desa | 0,930 | 0,7 | Reliabel |
| Tata kelola Pemerintaha Desa | 0.954 | 0,7 | Reliabel |
| Kinerja Kepala Desa | 0,925 | 0,7 | Reliabel |

 Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 21(2022)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas didapat nilai reliabilitas untuk nilai koefisien reliabilitas instrument penelitian lebih besar dari 0,700 yang berarti seluruh variabel penelitian dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan. Karena uji validitas dan uji reliabilitas menyatakan bahwa seluruh variabel valid dan reliable maka artinya instrumen ( kuesioner) yang digunakan valid dan reliabel.

**Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan – untuk masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pegujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan”.Uji normalitas

**Hasil Uji Normalitas**

|  |
| --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** |
|  | Kompetensi | Kepemimpinan | Komitmen | Tata\_Kelola | Kinerja |
| N | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Normal Parametersa,b | Mean | 66.8269 | 46.1859 | 56.6314 | 50.4808 | 71.3686 |
| Std. Deviation | 16.33006 | 10.34132 | 13.34463 | 12.92022 | 15.51999 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .191 | .185 | .172 | .233 | .147 |
| Positive | .079 | .098 | .065 | .163 | .115 |
| Negative | -.191 | -.185 | -.172 | -.233 | -.147 |
| Test Statistic | 1.191 | 1.185 | 1.172 | 1.233 | 1.147 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .080c | .110c | .070c | .171c | .065c |
| a. Test distribution is Normal. |
| b. Calculated from data. |
| c. Lilliefors Significance Correction. |

 Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 21 (2022)

**Uji Asumsi SEM**

**Membuat Model Berdasarkan Teoritis**

****

**Gambar Hasil Modifikasi Model Sesuai Arahan Amos**

Berdasarkan hasil estimasi model pada Gambar 4.2 diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan modifikasi model. CMIN/DF menurun, nilai CMIN/DF yang diperoleh sebesar 1,941 telah berada di bawah 2,000 yang berarti bahwa setelah dilakukan modifikasi model, goodness of fit terpenuhi, sehingga model modifikasi inilah yang selanjutnya akan digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk.

**Menilai Kriteria Goodness of Fit**

 Menilai goodness of fit menjadi tujuan utama dalam SEM untuk mengetahui sampai seberapa jauh model yang dihipotesiskan “Fit” atau cocok dengan sampel data. Hasil goodness of fit ditampilkan pada data berikut ini

**Hasil Analisis Model Struktural Penelitian
 (Setelah melalui Proses Modifikasi Model)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ukuran GOF** | **Estimasi** | **Hasil Uji** |
| Statistik Chi-Square (X2) | 780,238 | Not Fit |
| P-Value | 0,000 | Not Fit |
| CMIN/df (df= 414) | 1,941 | Good Fit |
| Goodness-of-fit Index (GFI) | 0,862 | Marginal Fit |
| Root ,ean square error of approximation (RMSEA) | 0,055 | Good Fit |
| Expected cross-validation index (ECVI) | 3,113 | Good Fit |
| Tucker-Lewis Index (TLI) atau non-normed Fit Index (NNFI) | 0,936 | Good Fit |
| Normed Fit Index (NFI) | 0,893 | Good Fit |
| Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) | 0,829 | Marginal Fit |
| Incremental Fit Index (IFI) | 0,945 | Good Fit |
| Comparative Fit Index (CFI) | 0,945 | Good Fit |
| Parsimonius Goodness of Fit (PGFI) | 0,698 | Marginal Fit |
| Parsimonius Normed Fit Index (PNFI) | 0,772 | Marginal Fit |

 Sumber: Hasil pengolahan data AMOS

Hasil perhitungan nilai Chi-square (x2) untuk model yang diteliti adalah sebesar 780,238 dengan nilai p-value = 0,000 < 0,05. Nilai Chi-square (x2) tersebut akan dibandingkan dengan nilai Chi-table (x2tabel) pada taraf signifikansi 5% dengan df = 309 diperoleh nilai Chi-table sebesar 350,995. Diketahui nilai Chi-square > Chi-tabel (780,238 > 350,995) yang menunjukan bahwa **model tidak fit**. Artinya bahwa apabila goodness of fit model dinilai dari nilai chi square, maka model yang diperoleh tidak baik, **namun demikian**, oleh karena acuan goodnees of fit model melalui nilai chi square hanya dapat digunakan pada sampel kecil < 200 dan jumlah sampel dalam penelitian ini cukup besar yaitu 312, maka acuan goodness of fit dengan menggunakan nilai chi square ini tidak dapat digunakan pada model ini. Belum dapat disimpulkan bahwa model good fit ataupun not fit. Goodness of fit model pada jumlah sampel > 200 dapat dilihat dari nilai CMINDF. Apabila nilai CMINDF telah < 2,000 maka meskipun secara nilai chi square model tidak fit, akan tetapi model tetap dianggap fit karena nilai CMINDF telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

**Pengujian Hipotesis**

Penelitian ini mengajukan 5 perumusan maslah, yaitu :(1) Apakah terdapat pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha dan Komitmen terhadap Tata kelola, (2) Apakah terdapat pengaruh Kompetensi terhadap Tata kelola, (3) Apakah terdapat pengaruh Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha terhadap Tata kelola, (4) Apakah terdapat pengaruh Komitmen terhadap Tata kelola, (5) Apakah terdapat pengaruh Tata kelola pemerintahan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa.

**Uji Simultan**

**1. Pengaruh Kompetensi Kepala Desa, Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha dan Komitmen Kepala Desa terhadap Tata kelola.**

**Uji Simultan (R-square)**

Variabel R-Square

Keputusan Pembelian **0.755**
Sumber: Data di olah, IBM SPSS AMOS 26

Hasil pengolahan data juga menunjukan nilai R2 untuk persamaan diatas adalah sebesar 0,755 ini berarti bahwa tata kelola pemerintahan Desa dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi, kepemimpinan yang berwawasan wirausaha dan komitmen sebesar 75,5%. Nilai ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan Desa diluar kompetensi, kepemimpinan yang berwawasan wirausaha dan komitmen sebesar 0,245 atau sebesar 24,5%.

 **Uji Parsial**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|   |   |   | Estimate | S.E. | C.R. | P | Label |
| Tata\_Kelola | <--- | Kompetensi | 0.148 | 0.023 | 6.514 | \*\*\* | par\_27 |
| Tata\_Kelola | <--- | Komitmen | 0.196 | 0.022 | 8.994 | \*\*\* | par\_28 |
| Tata\_Kelola | <--- | Kepemimpinan | 0.177 | 0.032 | 5.509 | \*\*\* | par\_30 |
| Kinerja | <--- | Tata\_Kelola | 0.958 | 0.105 | 9.110 | \*\*\* | par\_29 |

Pengujian secara parsial dilakukan dengan melihat nilai C.R dan nilai p-value pada masing-masing variabel independent (laten eksogen) terhadap variabel dependen (laten endogen). Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan pengujian secara parsial sebagai berikut:

1. Kompetensi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa . Hal ini dapat di lihat pada nilai C.R sebesar 6.514 lebih besar dari 1.65 dan nilai p- value sebesar 0.000 < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

2. Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa. Hal ini dapat di lihat pada nilai C.R sebesar 5.509 lebih besar dari 1.65 dan nilai p- value sebesar 0.000 < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

3. Komitmen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa. Hal ini dapat di lihat pada nilai C.R sebesar 8.994 lebih besar dari 1.65 dan nilai p- value sebesar 0.000 < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

4. Tata kelola pemerintahan desa secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja kepala desa. Hal ini dapat di lihat pada nilai C.R sebesar 9.110 lebih besar dari 1.65 dan nilai p- value sebesar 0.000 < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

**Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dari Kompetensi Kepala Desa, Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha dan Komitmen terhadap Tata kelola Pemerintahan Desa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Pengaruh Langsung | Pengaruh tidak langsung (melalui) | Total Pengaruh tidak langsung | Total Pengaruh |
| Kompetensi Kepala Desa | Kepemimpinan yang Berwawasan Wirausaha | Komitmen |
| Kompetensi Kepala Desa (X1) | 10,7% | - | 5,3% | 5,4% | 10,7 % | 21,4% |
| Kepemimpinan yang Berwawasan Wirausaha (X2) | 9,6% | 5,3% | - | 7,1% | 12,4 % | 22,0% |
| Komitmen (X3) | 19,6% | 5,4% | 7,1% | - | 12,5 % | 32,1% |
| **Total Effect** | 75,5 % |

 Sumber : data diolah (2022)

**1. Pengaruh Kompetensi Kepala Desa terhadap Tata kelola.**

Besar pengaruh langsung kompetensi (X1) terhadap tata kelola pemerintahan Desa (Y) adalah sebesar 10,7%, sementara jika dimediasi oleh kepemimpinan yang berwawasan wirausaha (X2), pengaruh tidak langsung terhadap tata kelola yaitu sebesar 5,3%, sedangkan jika dimediasi komitmen, pengaruh kompetensi terhadap tata kelola yaitu sebesar 5,4%, jadi total pengaruh tidak langsung sebesar 10,7 % sehingga total pengaruhnya sebesar 21,4 %.

**2. Pengaruh Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha terhadap Tata kelola.**

Besar pengaruh langsung kepemimpinan yang berwawasan wirausaha (X2) terhadap tata kelola pemerintahan Desa (Y) adalah sebesar 9,6%, sementara jika dimediasi oleh kompetensi (X1), pengaruh tidak langsung terhadap tata kelola pemerintahan Desa yaitu sebesar 5,3%, sedangkan jika dimediasi komitmen, pengaruh kepemimpinan yang berwawasan wirausaha terhadap tata kelola pemerintahan Desa sebesar 7,1%, jadi total pengaruh tidak langsung sebesar 12,4 % sehingga total pengaruhnya sebesar 22,0 %.

**3. Pengaruh Komitmen kepala desa terhadap Tata kelola.**

Besar pengaruh langsung komitmen (X3) terhadap tata kelola pemerintahan Desa (Y) adalah sebesar 19,6% sementara jika dimediasi oleh kompetensi(X1), pengaruh tidak langsung terhadap tata kelola pemerintahan Desa yaitu sebesar 5,4%, sedangkan jika dimediasi kepemimpinan yang berwawasan wirausaha (X2), pengaruh komitmen terhadap tata kelola sebesar 7,1%, jadi total pengaruh tidak langsung sebesar 12,5 % sehingga total pengaruhnya sebesar 32,1%. Hal ini berarti bahwa besar pengaruh langsung komitmen terhadap tata kelola lebih tinggi dibandingkan besar pengaruh tidak langsungnya terhadap kelola dengan dimediasi oleh kompetensi dan kepemimpinan, hal ini berarti bahwa komitmen tinggi dalam diri kepala desa akan secara langsung dapat meningkatkan tata kelola pemerintah desa tanpa perlu dimediasi oleh kompetensi dan kepemimpinan kepala desa.

**4. Pengaruh Tata kelola pemerintahan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa**

Model struktur 2 menggambarkan hubungan antara tata kelola pemerintahan desa terhadap Kinerja kepala Desa, yang dinyatakan dalam hipotesis bahwa tata kelola pemerintahan Desa berpengaruh terhadap Kinerja kepala Desa.

**KINERJA = 0,940 (ρZY) + 116 (e2), Ry = 0,884**

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa variabel kinerja dipengaruhi secara positif oleh variabel tata kelola pemerintahan desa dengan koefisien jalur sebesar 0,940. Ini berarti jika tata kelola pemerintahan meningkat maka kinerja kepala desa di wilayah ciayumajakuning akan meningkat sebesar koefisien jalur tersebut yaitu sebesar 0,940 atau setiap peningkatan dari tata kelola pemerintahan desa sebesar 1 satuan akan memberikan derajat kontribusi terhadap peningkatan kinerja sebesar 0,940 satuan.

Hasil pengolahan data juga menunjukan niai R2 untuk persamaan diatas adalah sebesar 0,884 ini menggambarkan bahwa kinerja kepala desa di wilayah ciayumajakuning dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan desa sebesar 88,4%. Nilai ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja kepala desa diluar faktor tata kelola pemerintahan sebesar 0,116 atau 11,6%.

**Kesimpulan dan Saran**

**Kesimpulan**

Analisis penelitian dan pembahasan bertujuan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan hal itu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran kondisi kempetensi, kepemimpinan yang berwawasan wirausaha dan komitmen kepala desa di wilayah Ciayumajakuning yaitu:
2. Kompetensi secara rata-rata termasuk dalam kategori baik tetapi tetapi masih ada simpangan menuju pencapaian ideal.

Dimensi terendah dalam variabel kompetensi adalah dimensi *Cognitive*terutama pada aspek mampu berpikir analistis. Terdapat aspek lain yang mempunyai nilai rata rata yang paling rendah dalam dimensi *Cognitif* yaitu memiliki keahlian tekhnikal/ profesional.

1. Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha secara rata-rata termasuk dalam kategori baik tetapi masih ada simpangan menuju pencapaian ideal.

Dimensi terendah dalam variabel Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha adalah dimensi tanggap terhadap sumber-sumber daya dengan aspek terendah berada pada aspek Saya mempunyai kemampuan menyalurkan SDM yang ada.

1. Komitmen secara rata-rata termasuk dalam kategori baik tetapi masih ada simpangan menuju pencapaian ideal.

Dimensi terendah dalam variabel Komitmen adalah dimensi Senang apabila dapat bekerja di organisasi sampai selsai dengan aspek terendah berada pada aspek Berlangsungnya organisasi di tentukan oleh sikap saya sebagai kepala Desa.

1. Tata kelola pemerintahan Desa secara rata-rata termasuk dalam kategori baik tetapi masih ada simpangan menuju pencapaian ideal.

Dimensi terendah dalam variable Tata kelola pemerintahan Desa adalah dimensi Tegaknya Supremasi Hukum dengan aspek terendah berada pada aspek Saya selalu menegakan hukum dengan tegas dan disiplin dalam segala hal.

1. Kinerja Kepala Desa secara rata-rata termasuk dalam kategori baik tetapi masih ada simpangan menuju pencapaian ideal. Dimensi terendah dalam variable Kinerja Kepala Desa adalah Transparan dengan aspek terendah berada pada aspek Bertambahnya wawasan pengetahuan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Kompetensi, Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha dan komitmen kepala desa secara simultan memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pembentukan Tata kelola pemerintahan Desa di wilayah Ciayumajakuning sebesar 75,5%.
3. Pengaruh secara parsial kompetensi kepala desa terhadap tata kelola pemerintahan desa di wilayah ciayumajakuning adalah sebesar 21,4% dan merupakan pengaruh terendah pembentuk tata kelola pemerintahan desa diantara variabel lainnya. Adapun dimensi paling kecil pembentuk variabel kompetensi kepala desa adalah *impact and influence.*
4. Pengaruh secara parsial kepemimpinan yang berwawasan wirausaha terhadap tata kelola pemerintahan desa di wilayah ciayumajakuning adalah sebesar 22,0% dan merupakan pengaruh tertinggi kedua pembentuk tata kelola pemerintahan desa diantara variabel lainnya. Adapun dimensi paling kecil pembentuk variabel kepemimpinan yang berwawasan wirausaha adalah Tanggap terhadap peluang-peluang.
5. Pengaruh secara parsial Komitmen kepala Desa terhadap tata kelola pemerintahan desa di wilayah ciayumajakuning adalah sebesar 32,1% dan merupakan pengaruh tertinggi pembentuk tata kelola pemerintahan desa diantara variabel lainnya. Adapun

dimensi paling kecil pembentuk variabel Komitmen kepala Desa adalah Bangga memberitahukan hal tentang organisasi dengan orang lain .

1. Tata kelola pemerintahan desa memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pembentukan Kinerja kepala Desa di wilayah ciayumajakuning adalah sebesar 88,4%. Nilai ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja kepala Desa diluar faktor Tata kelola pemerintahan Desa yang ditujukan oleh varian error, sebesar 11,6%.

**Saran**

1. Dalam upaya peningkatan kompetensi Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha dan Komitmen Kepala Desa maka ada beberapa langkah konkrit yang dapat dilakukan Pemerintah Desa meliputi:

a) Kompetensi Kepala Desa

 -Optimalisasi peningkatan kompetensi kepala desa melalui peningkatan kapasitas sesuai yang dibutuhkan oleh para kepala Desa.

b) Kepemimpinan yang berwawasan Wirausaha

-Percaya diri membuat kita berani melakukan apapun di sekitar kita. Percaya diri menjadi semangat bagi Kepala Desa untuk tampil dengan baik. Sehingga ini menimbulkan sikap optimis bagi diri kepala Desa untuk lebih maju.

c) Komitmen Kepala Desa

- Lingkungan kerja yang menyenangkan merupakan hal penting dalam menentukan kinerja Kepala Desa. Karena lingkungan kerja yang nyaman akan memberikan energi positif sehingga kepala Desa merasa senang dan semangat dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Rasa nyaman juga bisa memberikan komitmen bagi Kepala Desa untuk menata program sebaik mungkin.

2. Dalam upaya peningkatan Tata kelola pemerintahan Desa untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas maka ada beberapa langkah konkrit yang dapat dilakukan Pemerintah Desa meliputi:

1. Masyarakat harus lebih aktif dalam berpartisipasi, baik berpartisipasi dalam pikiran atau mental serta berpartisipasi dalam proses administratif, karena sangat dibutuhkan guna untuk kemajuan desa.
2. Penegakan hukum di desa harus ditingkatkan dan di sarankan agar pemerintah desa bisa merumuskan peraturan desa dengan tujuan menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama di desa.
3. Transparansi perlu untuk ditingkatkan lagi oleh pemerintah karena banyak masyarakat ingin mengetahui pengelolaan keuangan baik untuk program yang sedang berlangsung maupun sudah selesai.

3. Dalam upaya peningkatan Kinerja kepala Desa untuk lebih mendorong para kepala Desa dapat terus meningkatkan kinerjanya. maka ada beberapa langkah konkrit yang dapat dilakukan Pemerintah Desa meliputi:

1. Untuk menjamin terealisasinya semua rencana pembangunan desa, maka disarankan agar pada saat selesainya penyusunan dan penetapan rencana pembangunan desa, kepala desa pada saat itu juga perlu adakan sosialisasi langsung kepada masyarakat/ transparansi untuk mengajak masyarakat berparisipasi aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan desa.
2. Untuk semakin menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pembangunan desa, maka disarankan bagi kepala desa beserta aparat desa dapat menggali dan memahami kebutuhan masyarakat yang dirasakan mendesak dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan.

4. Mengingat secara simultan Kompetensi, Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha dan Komitmen berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Kepala Desa, maka Forum Kepala Desa harus mengusulkan kepada pihak Kecamatan atau pun ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa suatu pola pendekatan Bimbingan kepada para Kepala Desa dengan metode *Coaching* yang dapat memfasilitasi para kepala Desa menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan di pemerintahan Desa.

1. Mengingat Kompetensi mempunyai pengaruh terhadap Tata kelola pemerintahan Desa, maka harusnya Forum Kepala desa yang ada di setiap kabupaten Ciayumajakuning membuat program peningkatan kapasitas pengetahuan, skill dan sikap secara rutin.
2. Mengingat Kepemimpinan yang berwawasan wirausaha berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan Desa maka disarankan kepada forum kepala desa yang ada di tiap Kabupaten di wilayah Ciayumajakuning agar dapat membuat sebuah program tentang pengembangan kepemimpinan wirausaha yang dirancang dengan baik.
3. Mengingat Komitmen berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan Desa maka disarankan kepada para kepala Desa di wilayah Ciayumajakuning harus bangga memberikan informasi tentang pemerintahan nya kepada masyarakat atau lembaga bahkan kepada pemerintahan diatasnya, selalu koordinasi dengan lembaga tentang pemerintah Desa.
4. Mengingat Tata kelola Pemerintahan Desa berpengaruh terhadap Kinerja Kepala Desa maka disarankan kepada para kepala Desa di wilayah Ciayumajakuning dalam membuat visi dan misi harus melihat segala potensi yang ada di Desa, banyak potensi yang ada di Desa, ada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kebanyakan kepala Desa dalam membuat visi jarang menyentuh kepada hal-hal terkait sumber daya alam.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Acintya, I. G. A. A. D., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2015). *Kinerja Pemerintah Kota Denpasar dalam Implementasi SAKIP dan Penerapan Good Governance*. EJurnal Akuntansi Universitas Udayana, 12(2), 233–248
2. Aminudin, A. (2019). *Implementation of Good Village Governance in Village Development*. *Journal of Public Administration and Local Governance*, *3*(1), 1. https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1356
3. Busro, Muhammad. (2018). Teori*-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadameidia Group
4. Luthans, Fred. (2017). *Perilaku organisasi.* Yogayakarta : Andi
5. Marwansyah. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Alfabeta, Bandung.
6. Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro (2011). *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis).* Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta.
7. Sudarmanto. (2011). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi*). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
8. Stimson, Robert jd.at.al. (2011). *Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategi.* Second Edition. Australia: Springer.
9. Sopiah. (2013). *Prilaku Organisasional*. Yogyakarta: ANDI.
10. Sugiyono, (2014), *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)